

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Abad XXI ditandai dengan suatu era bebas AFTA-2003 (*Asean Free Trade Area*) dan APEC-2020 (*Asia Pacific Economic Cooperation*) yang menyiratkan kompetisi sangat tinggi serta diwarnai dengan tuntutan yang lebih rumit dan menantang. Era global ini juga ditandai dengan perkembangan yang luar biasa di bidang IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), psikologi serta transformasi nilai-nilai budaya. Degeng (2000: 3) mengungkapkan bahwa kita memasuki suatu era yang ditandai dengan *kesemrawutan* global, keragaman perilaku, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dimana-mana terjadi perubahan sangat cepat dan tidak linear. Dampak dari era ini antara lain adalah perubahan cara pandang manusia terhadap manusia, cara pandang terhadap pendidikan, perubahan peran orang tua/guru/dosen, dan perubahan pola hubungan antar mereka. Konsekuensinya adalah hanya yang bermutu yang akan “*survive*”. Pendidikan tidak lagi hanya dilihat sebagai upaya menyiapkan anak memasuki masa depan, namun juga sebagai proses agar individu dapat “hidup” dalam situasi dan kondisi apapun dan di tempat manapun. Tujuan terpenting dari pendidikan adalah mengembangkan kemampuan mental yang memungkinkan individu dapat belajar.

Menurut Sumardjo (2003: 4), perubahan cara pandang terhadap pendidikan sebagai imbas dari era globalisasi, secara empiris nampaknya membawa pengaruh antara lain tidak dapat dielakkannya otonomi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Otonomi pendidikan mengandung makna penyerahan kebijakan

pendidikan pada pihak penyelenggara pendidikan, dalam hal ini pihak sekolah, tanpa banyak campur tangan dari pihak lain termasuk pemerintah. Dalam hal ini sekolah bersama dengan komunitas/masyarakat setempat diberi kesempatan untuk mengelola lembaga pendidikan secara bertanggungjawab. Sistem pendidikan nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang demokratis, memperhatikan keberagaman, memperhatikan kebutuhan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Otonomi pendidikan ini menggulirkan 6 pola/manajemen pendidikan dan Kurikulum Berbasis Kompetensi (selanjutnya disingkat dengan KBK). Enam pola/manajemen pendidikan tersebut ditandai dengan:

1. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
2. Melibatkan masyarakat.
3. Pemberdayaan sekolah.
4. Orientasi pada kualitas.
5. Tidak ada penyeragaman.
6. Pemerintah sebagai inspirator, koordinator serta fasilitator.

KBK dalam otonomi pendidikan ini merupakan kurikulum yang dianggap pendekatannya lebih kondusif untuk mengupayakan peningkatan mutu pendidikan secara kontekstual (*learning to know, learning to do, learning to be and learning to live together*). KBK diharapkan mampu membekali dan mempersiapkan peserta didik dengan berbagai kemampuan untuk menjawab tantangan arus globalisasi. Cara yang ditempuh adalah dengan melalui perencanaan, pelaksanaan,

dan evaluasi terhadap sistem pendidikan secara efektif, efisien, dan berhasil guna, sehingga nantinya dapat memberi kontribusi terhadap pembangunan masyarakat dan kesejahteraan sosial, serta lentur dan adaptif terhadap berbagai perubahan. Tujuan utama KBK adalah memandirikan atau memberdayakan sekolah dalam mengembangkan kompetensi yang akan disampaikan pada peserta didik sesuai dengan kondisi lingkungan.

Surya (Pikiran Rakyat, 2 Mei 2002) mengemukakan pendapatnya tentang KBK berkaitan dengan menyongsong agenda reformasi pendidikan yaitu:

Salah satu komponen yang sering dijadikan sasaran penyebab menurunnya mutu pendidikan ialah kurikulum. Kritikan yang cukup tajam terhadap kurikulum antara lain kurikulum terlalu padat, tidak sesuai dengan kebutuhan anak, memberatkan anak, merepotkan guru dan sebagainya. Oleh karena itu, akan dilakukan inovasi melalui penerapan kurikulum berbasis kompetensi yaitu kurikulum sebagai rujukan pengalaman belajar yang diarahkan bagi tercapainya penguasaan kompetensi. Kompetensi itu sendiri merupakan perwujudan dari ketrampilan hidup yang harus dikuasai oleh peserta didik.

Dirjendikdasmen Dr. Ir. Indra Djati Sidi menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan KBK adalah untuk menghasilkan terjadinya demokratisasi pendidikan. Hasil keluaran dari KBK adalah terciptanya para lulusan yang menghargai keberagaman (Pikiran Rakyat, 28 April 2002).

Implementasi KBK di dunia pendidikan Indonesia mulai dilakukan tahun 2004 secara bertahap, namun demikian berbagai fakta di lapangan menunjukkan bahwa proses sosialisasi dan implementasi kurikulum ini menimbulkan berbagai reaksi yang berbeda diantara masyarakat maupun pihak-pihak yang langsung terkait di dalamnya yaitu para guru/pendidik. Sebagian masyarakat menunjukkan sikap mendukung pelaksanaan KBK ini, tetapi ada juga yang meragukan bahkan menolaknya. Masalah ini dapat dibaca dari banyak artikel yang mengangkat topik

KBK. KBK dalam tataran konsep diakui sebagai kurikulum yang ideal, tetapi pada tingkat operasional di lapangan ditemukan berbagai kendala.

Alasan-alasan yang tidak mendukung terhadap implementasi KBK adalah sebagai berikut.

1. Menurut Tilaar (*Educare* no. 1/1/April 2004: 16), KBK bukan satu-satunya konsep ideal dalam pembenahan sistem pendidikan. Persoalan yang utama bukan soal kompetensi, tetapi masalah riil yang dihadapi masyarakat yang harus dipecahkan. Apalagi *Competency Base Learning* adalah *caplok*an dari negara-negara maju. Lebih lanjut dikatakan bahwa konsep kompetensi ini datang dari negara industri sehingga timbul pertanyaan, “Apakah saat ini, masyarakat sudah layak disebut masyarakat industri?”
2. Sumarsih (*Educare* no. 1/1/April 2004: 9) mengatakan tidak mudah mengubah paradigma guru dalam mengajar. Guru sebagai ujung tombak pendidikan pembelajaran sudah sekian lama menggunakan metode lama yaitu menjadi sumber belajar utama. Guru senior sulit diminta mengubah dengan cara-cara baru dalam pembelajaran di kelas.
3. Putranti (*Educare* no. 1/1/April 2004: 12) mengungkapkan bahwa implementasi KBK mengakibatkan tuntutan terhadap pekerjaan guru akan meningkat. KBK menuntut guru lebih memiliki kesabaran maupun kreativitas agar terjadi keseimbangan di antara siswanya. Artinya, siswa dengan daya tangkap yang cepat tidak terbelak, sedangkan yang lambat tetap tertangani. Guru harus mencermati siswa satu per satu dan membuat materi pelajaran yang menarik sehingga membuat siswa kompeten. Bagaimanapun

juga sistem ini akan menuntut guru memberikan ekstra pendampingan dalam pengajarannya.

4. Peserta didik dalam KBK tidak hanya dinilai aspek kognitifnya saja, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik. Penilaian seperti ini menjadikan bentuk rapor berubah dan penulisan rapor memakan waktu lebih lama, karena penilaian aspek afektif dan psikomotorik diberikan untuk setiap peserta didik secara kualitatif. Perubahan rapor ini menuntut guru menyediakan banyak waktu untuk mengerjakannya. (Wawancara dengan guru SMP Santa Maria Surabaya).
5. KBK menuntut kemampuan guru dalam menjalankan pembelajaran berbasis kompetensi dengan merencanakan sendiri strategi yang tepat diterapkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah setempat. Tuntutan ini tidak mudah dilakukan karena guru sudah terbiasa mendapatkan pedoman pembelajaran secara lengkap dari Pusat Kurikulum Pendidikan Nasional. (Wawancara dengan guru SMP Providentia Bandung).
6. Fasilitas pendidikan di sekolah masih sangat minim, padahal konsep KBK lebih menitikberatkan pada praktek di lapangan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki daripada hanya teori semata. (Wawancara dengan guru SMP Santa Maria Surabaya).
7. Yushak (Gerbang Edisi 11 Th. III/Mei 2004: 61) berpendapat bahwa KBK membawa paradigma baru pendidikan, oleh karena itu implementasi KBK perlu disambut dengan gembira. Namun di sisi lain, ketika dihadapkan pada

keterbatasan waktu untuk praktikum dan fasilitas laboratorium maka hal ini menjadi mustahil dilakukan.

8. Guru dan peserta didik belum terbiasa dengan paradigma baru, mereka masih terfokus dengan pola pendidikan lama yaitu *teacher oriented* dan *rational oriented*. Menurut Nike (Krisan Edisi 7 Th. IV/Januari 2005: 11) guru SMA St. Maria Surabaya, peserta didik yang sudah terbiasa dengan menggunakan metode ceramah akan mengalami sedikit kesulitan apabila tidak segera diubah cara belajar maupun kebiasaannya. Demikian juga siswa yang pasif, penakut, kurang inisiatif, dan tidak cepat adaptasi akan mengalami kesulitan dalam kegiatan belajar mengajar dengan KBK.
9. Moi, O. Carm (*Educare* no. 6/I/ September 2004: 32) mengungkapkan bahwa siswa belum terbiasa dengan proses reflektif yaitu perenungan atas apa yang dilihat, dipikirkan, dan dikerjakannya. Pola pikir mereka masih bersifat rasional, bukan pengendapan nilai yang dipelajari, dampaknya siswa belum bisa menerima paradigma KBK.
10. Biaya yang dibutuhkan sangat besar untuk masing-masing bidang studi. Nurkolis (Kompas, 10 November 2003) menjelaskan bahwa untuk menerapkan KBK dengan baik perlu dana yang besar untuk memenuhi kebutuhan sumber belajar serta alat dan media pembelajaran, sedangkan Moi, O. Carm menyatakan bahwa untuk sekolah favorit yang para siswanya berasal dari kalangan menengah ke atas, hal ini mungkin tidak menjadi masalah. Keadaan ini akan sangat sulit diwujudkan untuk sekolah yang ada di desa dari masyarakat berekonomi rendah (*Educare* no. 6/I/September 2004: 32).

11. Guru dituntut untuk kreatif dalam menciptakan berbagai metode pengajaran, sehingga mampu mengantar peserta didik dalam merefleksikan ilmu yang dipelajari. Padahal agar hal ini dapat dicapai dibutuhkan waktu lama, sementara pembagian waktu yang ada tidak memungkinkan, dampaknya adalah siswa asal melakukannya (Kompas, 4 Februari 2004).
12. Sikap dan moralitas peserta didik amat penting sebagai pelaku utama pendidikan, tetapi dalam KBK ilmu humaniora sangat minim. (Wawancara dengan guru SMP Santa Ursula Jakarta).
13. KBK sangat sulit diterapkan pada jumlah peserta didik yang banyak dalam satu kelas (sistem klasikal), padahal dalam kenyataannya jumlah peserta didik pada umumnya dalam satu kelas adalah 42 anak. (Wawancara dengan guru SMP Santa Maria Surabaya).
14. Drost, SJ menyatakan bahwa tidak mungkin kompetensi yang tinggi dapat dicapai apabila dalam satu kelas guru harus mengajar siswa yang lemah kemampuannya, siswa biasa dan pintar secara bersama-sama (Kompas, 26 Januari 2004).
15. Setiap sekolah SMP dan SMA harus menetapkan standar ketuntasan minimal (selanjutnya disingkat SKM) untuk masing-masing pelajaran. Fungsi SKM adalah sebagai patokan kemampuan peserta didik di masing-masing sekolah. Peserta didik dianggap memiliki ketuntasan belajar di sekolah tersebut apabila nilai yang dicapai tidak kurang dari SKM yang ditetapkan. Ketentuan SKM ini sekarang menimbulkan polemik. Beberapa sekolah di Surabaya misalnya, sampai sekarang ada yang belum membagikan rapor siswa KBK, karena

masih ada sekolah yang belum bisa menentukan SKM (Jawa Pos, 4 Februari 2005).

Alasan-alasan yang mendukung implementasi KBK diungkapkan sebagai berikut.

1. Letak keunggulan KBK adalah penghargaan bagi pribadi siswa. Siswa yang mampu menyerap materi dengan cepat akan mendapat tambahan materi sebagai pengayaan, sedangkan yang kurang akan ditangani oleh guru dengan penuh kesabaran (*Educare* no. 1/1/ April 2004: 8).
2. KBK menerapkan pembelajaran dengan model kontekstual yang sangat diperlukan dalam kenyataan hidup, sehingga siswa dapat lebih mengerti dan menjiwai kehidupan sehari-hari. Siswa diajak untuk belajar proses, sehingga mendorong keinginan siswa untuk meneliti topik yang dipelajari dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan belajar mengajar diisi dengan lebih banyak diskusi, wawancara, dan observasi. KBK membuat siswa lebih aktif untuk mengungkapkan pendapat atau minta penjelasan guru (*Educare* no. 1/1/ April 2004: 9).
3. Ciputra & Tenggara, siswi di SMP Santa Maria Juanda, Jakarta, berpendapat bahwa KBK tidak hanya cocok untuk siswa yang pandai. Untuk yang kurang pandai, KBK juga lebih menguntungkan, karena siswa dapat bertanya pada temannya yang pandai, misalnya pada saat diskusi kelompok atau pada saat mengerjakan tugas-tugas kelompok (*Educare* no. 1/1/ April 2004: 11). Merlinawati, siswi SMA Santa Maria Surabaya juga mengungkapkan bahwa

model pembelajaran KBK membuat siswa menjadi senang dan “asyik” tidak membosankan. (Krisan Edisi 7/Th. IV/ Januari 2005: 13).

4. DR. Budiono, Kepala Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional, mengatakan bahwa KBK tidak hanya menekankan pada cara atau teori. “Tapi lebih mengajarkan siswa untuk lebih mandiri, cerdas, kritis, rasional dan kreatif dalam menghadapi tantangan hidup”. (*Educare* no. 1/1/ April 2004: 13).
5. KBK bisa “diandalkan” menjadi patokan dalam menghadapi tantangan masa depan dengan pembekalan ketrampilan pada siswa, serta memiliki kemampuan beradaptasi dengan daerah setempat karena ketrampilan yang diajarkan disesuaikan dengan lingkungan dan kemampuan siswa. (Wawancara dengan guru SMP Providentia Bandung).
6. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Suyanto (2004) menyatakan “Kurikulum memang harus sering diganti sesuai dengan dinamika perubahan masyarakat. Padahal di dunia ini tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri.” Selanjutnya menurut Suyanto, masyarakat kita memiliki trauma dengan perubahan kurikulum, termasuk guru. Saat ini sebagian besar guru berada dalam kecemasan terhadap diberlakukannya KBK. Trauma ini terjadi karena perubahan-perubahan kurikulum itu tidak bisa memberikan bukti terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Masalah ini terjadi karena guru sebagai ujung tombak pelaksanaan kurikulum kurang diberdayakan. Guru sudah terbiasa dengan pola mengajar yang lama (konvensional) dan mengalami kesulitan untuk berubah, padahal implementasi KBK adalah

sebuah inovasi. Kunci sukses dalam sebuah inovasi terletak pada kemauan orang-orang pelaksana di lapangan untuk berubah. Perubahan ini menyangkut aspek pola pikir, filosofi dan komitmen. (Suyanto, n.d., *Persoalan Implementasi KBK*, para 5-6).

Pro dan kontra terhadap implementasi KBK juga mewarnai pendapat, sikap dan persepsi guru di SMP Santa Maria Surabaya, SMP Santa Ursula Jakarta dan SMP Providentia Bandung, sehingga masalah ini perlu segera ditanggulangi oleh Yayasan agar aktifitas pembelajaran dapat tetap dilaksanakan dengan baik. Bertitik-tolak dari implementasi KBK yang masih baru dilaksanakan (*novelty*) serta adanya kenyataan di lapangan yang menunjukkan keberagaman persepsi, dan sikap, kesimpangsiuran pemahaman serta kebingungan guru dalam menterjemahkan KBK dalam Kegiatan Belajar Mengajar (selanjutnya disingkat KBM) di sekolah, khususnya di SMP Santa Maria Surabaya, SMP Santa Ursula Jakarta dan SMP Providentia Bandung, maka peneliti mengangkat masalah KBK ini menjadi bahan penelitian, dengan memfokuskan masalah persepsi dan sikap guru terhadap implementasi KBK dengan motivasinya melaksanakan dalam KBM. Motivasi dipilih sebagai variabel bebas dalam penelitian ini, dengan asumsi bahwa motivasi memiliki korelasi yang dekat dengan perilaku, yakni motivasi melandasi perilaku, dalam hal ini perilaku guru melaksanakan KBK dalam KBM. Persepsi dan sikap dipakai sebagai variabel tergantung dalam penelitian ini, dengan asumsi bahwa di samping faktor-faktor lain, kedua variabel tersebut dapat mempengaruhi tingkat motivasi guru melaksanakan KBK dalam KBM. Hasil penelitian dari ketiga variabel ini nantinya diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui siap tidaknya KBK dilaksanakan di sekolah Ursulin Propinsi

khususnya di SMP Santa Maria Surabaya, SMP Santa Ursula Jakarta, dan SMP Providentia Bandung.

Djiwandono (2002: 341-344) mengutip Edward (1954) dan Atkinson (1964), serta Luthans (2002: 269) dengan *The Porter-Lawler motivation model* yang mengembangkan teori-teori motivasi yaitu *Expectancy Theories of Motivation*. Teori ini mengatakan bahwa motivasi manusia untuk melakukan sesuatu tergantung pada hasil perkiraan mereka akan adanya kesempatan untuk sukses (*perceived probability of success*) dan nilai yang mereka tempatkan pada sukses (*incentive value of success*).

Hellriegel, dkk. (1986: 189) lebih jelas mengemukakan *the effort-performance of expectancy* yang memaparkan bahwa individu akan memperkirakan seberapa sulit perilaku tertentu dapat dicapainya serta kemungkinan dari pencapaian perilaku tersebut. Individu membuat keputusan di antara alternatif-alternatif berdasarkan persepsinya terhadap tingkat *outcome* yang akan diberikan dari perilaku.

Bertitik-tolak dari teori harapan ini maka dapat dijelaskan bahwa kuat tidaknya motivasi guru untuk melaksanakan KBK dalam KBM dipengaruhi oleh harapan akan sukses dan nilai insentif untuk sukses terhadap implementasi KBK. Individu akan memperkirakan seberapa sulit melaksanakan KBK dalam KBM beserta kemungkinan dari pencapaian perilaku tersebut. Jika guru mempunyai harapan akan sukses dan nilai positif terhadap implementasi KBK, maka guru akan lebih termotivasi untuk melaksanakan KBK dalam KBM.

Diasumsikan bahwa ada hubungan antara harapan dan persepsi (Blake & Sekuler, 1990: 424-425) yaitu harapan mempengaruhi persepsi, serta ada hubungan antara sikap dan motivasi. Implikasinya adalah jika guru mempunyai harapan bahwa implementasi KBK akan sukses dan bernilai penting, maka dapat membawa pengaruh positif terhadap persepsi guru pada implementasi KBK. Persepsi dan sikap yang positif pada implementasi KBK mempengaruhi kuatnya motivasi guru untuk melaksanakan KBK dalam KBM. Artinya guru memiliki motivasi yang lebih baik untuk siap menerapkan kurikulum ini dalam KBM. Sebaliknya, bila harapan akan sukses rendah, maka persepsi dan sikap guru negatif terhadap implementasi KBK, sehingga dapat mengurangi motivasinya untuk melaksanakan kurikulum ini. Seperti apa yang dikatakan oleh Hassan (2003), "...semua niatnya baik ingin menyusun sistem yang mantap. Tapi kita semua tahu bahwa para pelakunya yang harus bisa diandalkan untuk pelaksanaannya."

1.2. Batasan Masalah

Karena ruang-lingkup KBK begitu luas dan multidimensional, maka penelitian ini lebih difokuskan hanya pada aspek psikologis yang menyangkut:

1. hubungan persepsi dan sikap guru pada implementasi KBK dengan motivasinya melaksanakan KBK dalam KBM di SMP yang dikelola biarawati Ursulin Propinsi Indonesia, yaitu SMP Santa Maria Surabaya, SMP Santa Ursula Jakarta dan SMP Providentia Bandung,
2. peran persepsi dan sikap guru pada implementasi KBK terhadap motivasinya melaksanakan KBK dalam KBM di SMP yang dikelola biarawati Ursulin

Propinsi Indonesia, yaitu SMP Santa Maria Surabaya, SMP Santa Ursula Jakarta dan SMP Providentia Bandung,

Ketiga SMP ini dipilih sebagai sampel penelitian karena peneliti menganggap bahwa sampel tersebut dapat memenuhi kriteria dan mewakili populasi untuk penelitian yang dilakukan, antara lain:

1. ketiga SMP tersebut mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal: tingkat mutu pendidikan sekolah, kualitas guru, tingkat kemampuan siswa, jumlah guru, strategi pembelajaran, penyediaan fasilitas, kurikulum serta sarana dan prasarana sekolah,
2. KBK sudah mulai dilaksanakan pada tahun ajaran 2004/2005 di ketiga SMP ini.

Subyek penelitian adalah guru intrakurikuler yang mengajar di SMP Santa Maria Surabaya, SMP Santa Ursula Jakarta dan SMP Providentia Bandung.

Pengambilan data dilakukan dengan teknik kuesioner serta wawancara langsung yang dilakukan sebagai upaya klarifikasi dan pendalaman informasi yang dibutuhkan.

1. 3. Rumusan Masalah

1. Apakah ada hubungan yang signifikan antara persepsi dan sikap guru pada implementasi KBK dengan motivasinya untuk melaksanakan KBK dalam KBM di SMP Santa Maria Surabaya, SMP Santa Ursula Jakarta dan SMP Providentia Bandung?

2. Apakah persepsi dan sikap guru memiliki pengaruh terhadap motivasi melaksanakan KBK dalam KBM di SMP Santa Maria Surabaya, SMP Santa Ursula Jakarta dan SMP Providentia Bandung?

1. 4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian saat ini adalah untuk mengetahui hubungan, pengaruh serta perbedaan persepsi dan sikap guru pada implementasi KBK terhadap motivasi melaksanakan KBK dalam KBM, sehingga dapat memahami apakah sistem pembelajaran dengan pendekatan KBK siap dilaksanakan oleh guru di SMP Santa Maria Surabaya, SMP Santa Ursula Jakarta dan SMP Providentia Bandung.

1. 5. Manfaat Penelitian

1. Dipakai sebagai bahan kajian untuk mengetahui siap tidaknya KBK dilaksanakan di sekolah yang dikelola oleh biarawati Ursulin Propinsi Indonesia di kota besar, khususnya di SMP Santa Maria Surabaya, SMP Santa Ursula Jakarta, dan SMP Providentia Bandung.
2. Sebagai informasi yang dapat dipakai untuk membantu perbaikan pelaksanaan KBK pada umumnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi lapangan di setiap unit sekolah yang ada.
3. Sebagai masukan bagi komisi Penelitian dan Pengembangan (LITBANG) di bidang karya pendidikan yang dikelola oleh biarawati Ursulin Propinsi Indonesia untuk mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah Ursulin pada masa mendatang.
4. Sebagai masukan bagi perkembangan teori psikologi pendidikan menyangkut metode pembelajaran.